

**RASIONALITAS TARUNA PEMILIH PEMULA DALAM PILKADA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2017**

**(Studi Penelitian: Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kemaritiman
Kota Pangkalpinang)**

Erzha Akbar Senjaya

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: erzhaakbar.2014@fisipol.umy.ac.id / purnawirawandanyon@gmail.com

NASKAH PUBLIKASI

**RASIONALITAS TARUNA PEMILIH PEMULA DALAM PILKADA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2017**

(Studi Penelitian: Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kemaritiman

Kota Pangkalpinang)

Disusun Oleh:

Erzha Akbar Senjaya

20140520117

Dosen Pembimbing

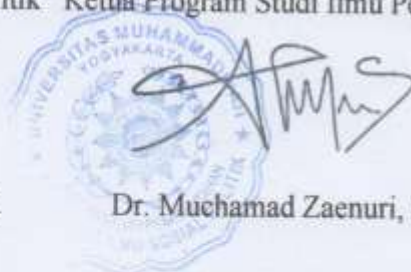
Tunjung Sulaksono, S.IP., M.Si

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si.



Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si.

ABSTRAK

Dalam melaksanakan pemilu, partisipasi politik merupakan instrumen penting yang menjadi tolak ukur dalam keberhasilan sebuah pemilu dilaksanakan, keikutsertaan pemilih pemula pada perspektif politik menjadi perwujudan pilihan dan sikap para pemuda pada politik. Dalam hal penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan pilihan rasional (*rational choice theory*) dimana dalam pendekatan rasional para pemilih akan menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan rasional. Hal tersebut nyatanya memiliki implikasi yang sangat strategis bagi Taruna/i dalam menentukan sikap politiknya, taruna/i yang didik sedemikian rupa memiliki orientasi dalam menentukan rasionalitas politiknya kearah yang sejalan dengan figur dan karakter yang dia miliki. Kejadian ini sangatlah disayangkan bahwasanya dengan adanya keterbukaan pilihan dalam berdemokrasi, pemikiran yang rasional serta moderatnya pendidikan dalam partisipasi politik belum bisa dijadikan modal yang cukup bagi mereka untuk menentukan pilihannya yang tidak semata-mata didasarkan pada latar belakang.

Kata kunci: *Pemilu, Pemilih Pemula dan Rasionalitas.*

Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan esensi yang digunakan sebagai sarana demokrasi dalam membentuk sistem kekuasaan di suatu Negara. Demokrasi pada dasarnya lahir dari kehendak rakyat karena rakyat menginginkan kekuasaan Negara dihasilkan dari bawah yaitu oleh rakyat sesuai dengan sistem permusyawaratan dan perwakilan. Pada kenyataannya pemilihan umum merupakan bagian dari suatu perwujudan dan pengakuan atas hak politik yang dimiliki masyarakat serta pendelegasian akan hak tersebut yang dilakukan oleh rakyat kepada wakil rakyat dalam menjalankan pemerintahan.

Pemilu dianggap tepat untuk menampung aspirasi masyarakat yang pluralistik, khususnya dalam menentukan calon pemimpin rakyat. Sebagaimana maknanya demokrasi dilihat dari asal katanya bermakna rakyat “berkuasa” atau “*government or rule by the people*” (Budiarjo dalam Astanti, 2016). Menurut Morissan (2005), pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara kedepan. Pandangan *Centre for Electoral Reform* (Cetro), pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu tonggak demokrasi yang berfungsi sebagai instrumen rekrutmen politik serta memfasilitasi proses sirkulasi elit politik.

Pilkada adalah mekanisme demokrasi yang disiapkan pemerintah agar masyarakat dapat memilih pemimpin mereka di tingkat daerah mulai dari Gubernur, Bupati dan Walikota. Pemilihan umum di provinsi dilakukan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dengan istilah Pemilihan Gubernur (Pilgub). Menurut Muslim (Lindawati, 2014), Pilgub adalah suatu proses demokrasi dengan cara memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk satu Provinsi dengan sah dan sesuai Undang-Undang yang ada dan diikuti dengan seluruh masyarakatnya.

Hal tersebut diperkuat didalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, dimana pengertian Pemilukada adalah:

“Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dalam melaksanakan pemilu, partisipasi politik merupakan instrumen penting yang menjadi tolak ukur dalam keberhasilan sebuah pemilu dilaksanakan. Partisipasi politik akan memperlihatkan tingkat aktivitas politik masyarakat dalam menentukan pilihannya ketika pemilu. Miriam Budiardjo (Lasut, 2014) mengatakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung dan memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Dalam melaksanakan partisipasi, pemilih sebagai pemilik suara sekaligus partisipan memiliki peran yang sangat penting dalam menyuarakan partisipasi politiknya. Surbakti (Azmi, 2014) mengatakan bahwa pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan.

Menurut pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, kemudian dalam pasal 19 ayat (1 dan 2) menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

Pemilih pemula merupakan golongan penduduk usia 17 tahun hingga 21 tahun, namun ada definisi yang lain yaitu pemilih pemula adalah mereka yang berstatus pelajar, mahasiswa, serta pekerja muda atau pemilih pemula ini adalah mereka yang baru akan mempunyai pengalaman pertama kali di dalam berpartisipasi dalam pemilihan umum, (Rohmah dalam Astanti, 2016). Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih menurut Pahmi, (2010) adalah:

- a. umur sudah 17 tahun;
- b. sudah/pernah kawin;
- c. purnawirawan/sudah tidak lagi menjadi anggota TNI / Kepolisian.

Partisipasi politik kaum muda atau pemilih pemula dapat diartikan sebagai penentuan sikap dan keterlibatan kaum muda sebagai individu atau kelompok dalam even/bidang politik. Menurut Huntington (Veplun, 2014), terdapat 2 bentuk partisipasi warga negara termasuk kaum pemula yang terdiri dari Partisipasi Konvensional antara lain pemberian suara (voting), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk atau bergabung dengan kelompok atau partai politik tertentu, atau komunikasi dengan pejabat partai politik tertentu, kemudian yang kedua adalah Partisipasi Non-Konvensional antara lain dengan pengajuan petisi, berdemonstrasi/unjuk rasa, mogok, konfrontasi, tindakan kekerasan politik, terhadap harta benda, perusakan, pemboman, pembakaran, tindak kekerasan politik terhadap manusia, penculikan, pembunuhan, bahkan perang dan revolusi.

Berdasarkan hasil pilkada serentak tahun 2017 dari KPU RI (<http://kpu.co.id>), bahwa jumlah pemilih pemula pada Pilkada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 28.328 orang dengan persentase sebesar 21,7 % atau satu perlima dari jumlah total pemilih. Dengan jumlah yang cukup besar maka diperlukan strategi pendekatan untuk dapat menjadikan pemilih pemula kedalam sumber suara yang potensial.

Tiga pendekatan teori yang seringkali digunakan oleh para sarjana untuk memahami perilaku pemilih yakni pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis dan pendekatan pilihan rasional (*rational choice theory*). Dalam hal penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan pilihan rasional (*rational choice theory*), teori yang dipopulerkan oleh James S. Coleman (1989). Teori pilihan rasional yang dikemukakan oleh Coleman terlihat jelas dalam gagasan dasarnya dimana “tindakan perseorangan mengarah kepada tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi)”.

Dalam pendekatan rasional, para pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan penilaiannya terhadap isu-isu politik, kandidat yang diajukan serta pilihan kandidat yang menguntungkan, dapat diartikan pemilih dapat menentukan pilihannya yang didasarkan pada pertimbangan secara rasional. Pengguna teori pendekatan rasional dalam hal ini menjelaskan suatu perilaku memilih para ilmuwan politik yang sebenarnya diambil dari adaptasi ilmu ekonomi dengan melihat adanya perumpamaan antara ekonomi (pasar) dan politik (perilaku memilih).

Hal tersebut terlihat saat pemilih pemula menentukan pilihan mereka kepada kandidat yang dapat memberikan keuntungan sebanyak-banyaknya. Contohnya ketika kandidat tersebut melakukan *money politic* dengan memberikan sejumlah barang, uang atau hal lainnya yang dapat diartikan untuk membeli suara. Tidak hanya itu, beberapa pemilih pemula juga memilih kandidat dengan melihat sosok dan latar belakang pribadi dari pada prestasi maupun rekam jejak dalam berpolitik.

Pada kenyataannya teori diatas terbukti pada salah satu Satuan Pendidikan Tingkat Kejuruan di Kota Pangkalpinang. SMK N 4 Kemaritiman adalah satu-satunya sekolah yang menggunakan sistem komando semi kemiliteran dalam basis pendidikannya. Hal tersebut membuat pengaplikasian nilai-nilai pendidikan karakter yang ditanamkan mengedepankan prinsip nasionalisme, jiwa kebangsaan dan nilai kesatuan persatuan terhadap mental karakter Taruna/i.

Hal tersebut nyatanya memiliki implikasi yang sangat strategis yaitu dalam menentukan sikap politiknya. Taruna/i yang dididik sedemikian rupa memiliki orientasi dalam menentukan rasionalitas politiknya kearah yang sejalan dengan figur dan karakter yang dia miliki, dalam hal ini Taruna/i akan cenderung menjatuhkan pilihannya pada figur Purnawirawan tentara dan basis partai politik berideologi nasionalis yang menjadi mesin politik dalam kontestasi pemilu.

Menurut Bayu Pratama, seorang Staf Ahli Komandan Batalyon 013-014 Pangkalan Marinir 4 Kota Pangkalpinang saat ditanya bagaimana pendapatnya tentang kontestasi Pemilu Presiden tahun 2014 silam, dia menuturkan bahwasanya dunia pemerintahan akan lebih baik dipimpin oleh seseorang yang memiliki rekam jejak dalam dunia militer. Menurutny seseorang yang dianggap mampu untuk memimpin negara sebesar Indonesia adalah orang yang tegas, serius, berani dan disiplin layaknya seorang tentara.

Jika dilihat antara pernyataan Bayu Pratama yang juga seorang Taruna Senior di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kemaritiman Kota Pangkalpinang dengan basis dasar pendidikan yang dia terima disekolah tersebut, maka hal ini berbanding lurus dengan apa yang ia pahami terkait dengan sosok pemimpin dan karakternya. Wajar saja dikarenakan Presiden dipilih melalui Pemilu yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sehingga Taruna/i memiliki sudut pandang politik yang berbeda dalam hal menentukan pilihannya.

Kejadian ini sangatlah disayangkan bahwasanya apakah dengan adanya keterbukaan pilihan dalam berdemokrasi, pemikiran yang rasional serta moderatnya pendidikan dalam partisipasi politik belum bisa dijadikan modal yang cukup bagi mereka untuk menentukan pilihannya yang tidak semata-mata didasarkan hanya bermodalkan latar belakang seorang purnawirawan tentara atau hanya karena didukung oleh partai nasionalis mereka sudah pasti akan memilihnya.

Penulis berpandangan bahwa kenyataan ini merupakan masalah yang sangat penting dan strategis mengingat bagaimana potensi pemilih pemula dalam pemilu yang dapat memberikan hasil yang signifikan terhadap kemajuan suatu daerah dan negara atas pilihan mereka. Jika nyatanya mereka memilih hanya karena kesamaan latar belakang tanpa melihat potensi, prestasi serta visi dan misi untuk membangun negeri, maka Indonesia masih belum dapat dikatakan sebagai negara yang memiliki iklim demokrasi yang maju dalam melaksanakan pemilu, hal ini bisa dilihat dari potensi dan level partisipasi politik yang rendah.

Melihat fakta lapangan yang sedemikian rupa nyatanya, membuat penulis meyakinkan diri untuk melakukan penelitian terhadap Rasionalitas Politik Taruna Pemilih Pemula di SMK N 4 Kemaritiman. Dalam hal ini penulis memiliki tiga alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, yaitu:

1. Pertama, penelitian ini adalah penelitian pertama yang dilakukan baik meliputi objek maupun subjek penelitian yang diikutsetakan didalamnya. Penelitian ini berangkat dari fenomena sosial kemasyarakatan didalamnya sehingga konteks maupun konsep penelitian dapat dikatakan memiliki kapabilitas dan integritas yang professional sehingga tidak dibuat-buat.

2. Kedua, SMK N 4 Kemaritiman Kota Pangkalpinang adalah satu-satunya sekolah berbasis pendidikan semi-kemiliteran di kota Pangkalpinang, sehingga dapat menjadi objek penelitian yang strategis dan terpercaya yang dapat membuat minimnya kesalahan informasi yang didapat selama penelitian.
3. Ketiga, ditengah era modern dan penuhnya akses dalam melihat dan menilai pilihan dalam pemilu baik dari sosok calon maupun partai politik, taruna/i seharusnya dapat menunjukkan kedewasaannya dalam menentukan pilihan politik yang tidak hanya didasarkan pilihan emosional semata.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode yaitu: pertama, peneliti menggunakan penelitian lapangan yang sesuai dengan obyek yang peneliti pilih. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Kedua, menggunakan "Library Research" yang mana metode dalam penelitian ini nantinya menggunakan teori-teori yang diambil dari buku literatur yang mendukung dan relevan.

Pola analisis data yang digunakan adalah etnografik, yaitu dari catatan lapangan (field note) kemudian akan dilakukan pengkodean, kategorisasi atau klasifikasi kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya akan disusun tema-tema berdasarkan hasil analisis data tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari tanggapan responden dalam menjawab pertanyaan tentang pilihan taruna-taruni dalam menentukan rasionalitasnya terhadap politik baik kepada figur maupun partai politik.

Pembahasan

1.1 Issue Politik Agama

Menurut Dion Saputra Prayoga Hermawan, ketika ditanya apakah issue politik agama yang sedang terjadi kala itu di Provinsi DKI Jakarta juga terbawa dan memberikan pengaruh-pengaruh tertentu pada pemilu di Provinsi Kep. Bangka Belitung, Dion mengatakan bahwa apa yang terjadi tentang issue politik agama di DKI Jakarta yang mendera Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sama sekali tidak terjadi di Bangka Belitung dan tidak memberikan pengaruh yang strategis.

Hal tersebut dikarenakan apa yang terjadi di DKI Jakarta dengan yang terjadi Bangka Belitung sama sekali berbeda dan tidak ada kaitanya sama sekali sehingga dalam menentukan pilihannya untuk pemilu di Provinsi Kep. Bangka Belitung Dion tidak memperdulikan tentang suku, agama, ras maupun antar golongan dari calon pemimpin melainkan melihat kinerja dan rekam jejak dari sosok yang akan dipilih.

Kasus ini bermula ketika Ahok berkunjung ke Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu pada bulan September 2016. Kunjungan tersebut dalam rangka Program Kerja sama Pemprov DKI dengan Sekolah Tinggi Perikanan (STP) untuk budidaya perairan. Di dalam video yang diunggah oleh Sie Publikasi dan Dokumentasi, Dinas Komunikasi Informasi dan Kehumasan, Pemprov DKI Jakarta, dalam pidatonya Ahok mengatakan dibohongi pakai surat Al-Maidah ayat 5. Kemudian video tersebut diunggah kembali oleh Buni Yani pada tanggal 5 Oktober 2016.

Selain itu, salah seorang taruni yang bernama Wahaidatul Lailia secara langsung mengatakan bahwa akan memilih pemimpin yang satu agama dengannya yaitu Islam sesuai dengan keyakinan yang dia yakini, namun ketika dihadapkan dengan pilihan antara pemimpin muslim tanpa kinerja atau pemimpin yang biasa dengan pemimpin beda agama yang memiliki kinerja seperti issue yang biasa digemakan di DKI Jakarta, maka dengan santai dia menjawab akan memilih pemimpin dengan kinerja yang menjanjikan meski beda agama.

1.2 Issue Politik Nasionalisme Kebangsaan

Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Nasionalisme dapat menonjolkan dirinya sebagai sebagian paham negara atau gerakan (bukan negara) yang populer berdasarkan pendapat warga negara, etnis, budaya, keagamaan dan ideologi. Kategori tersebut lazimnya berkaitan dan kebanyakan teori nasionalisme mencampuradukkan sebahagian atau semua elemen tersebut. James G Kellas (Azmy, 2016) memaknai nasionalisme sebagai:

“Nasionalisme merupakan sebuah ideologi dan bentuk perilaku. Ideologi nasionalisme dibangun di atas masyarakat yang memiliki kesadaran berbangsa (kesadaran diri nasional) yang ditunjukkan dengan sikap dan aksi, dalam bentuk budaya, ekonomi atau politik. Nasionalisme membangun kesadaran rakyat sebagai suatu bangsa serta memberi seperangkat sikap dan program tindakan.”

Pemahaman tersebut berkaitan dengan sasaran nasionalisme itu sendiri yaitu dicapainya otonomi nasional, kesatuan nasional dan identitas nasional yang disatukan dalam sebuah pemahaman mengenai sebuah bangsa yang aktual dan bangsa yang potensial. Komponen utama pembahasan mengenai nasionalisme adalah konsep mengenai bangsa dan kelompok etnis yang menjadi subyek sekaligus obyek dari nasionalisme itu sendiri.

Ketika penulis menyajikan issue politik nasionalisme kebangsaan kepada responden tentang apakah pemimpin yang akan dipilihnya harus berasal dari golongan tertentu salah satunya yaitu dari unsur militer atau tidak, Dion Saputra Prayoga Hermawan, mengatakan sebagai berikut:

“bahwa pemimpin dari unsur militer tidak dapat memberikan jaminan kalau dia akan dipilih. Ketegasan dan kharisma dari seorang pemimpin justru terkadang dapat menjadi bumerang tersendiri dalam memimpin sebuah daerah atau bahkan sebuah negara.”

Dion juga membandingkan gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang bukan berasal dari unsur militer namun memiliki ketegasan dengan gayanya sendiri ketika kala itu Malaysia memasang bendera Indonesia secara terbalik saat ajang SEA GEAMS Tahun 2017. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo untuk memberikan nota protes dan meminta konfirmasi dari Malaysia merupakan bentuk ketegasan dengan gayanya sendiri dan itu dinilai cukup tanpa harus memilih orang yang berasal dari unsur militer.

1.3 Komunikasi Politik Kandidat

Ada beberapa kandidat yang mencalonkan diri sebagai Cagub Bangka Belitung tahun 2017. Dari beberapa kandidat tersebut Reza Saputra, Taruna dari jurusan Nautika Kapal Niaga (NKN) mengatakan bahwa:

“secara pribadi saya pribadi memilih Erzaldi-Fattah karena dulunya Bapak Erzaldi adalah Bupati Bangka tengah dan dia telah terpilih selama 2 periode menjadi Bupati Bangka tengah. Selama beliau menjabat sebagai Bupati Bangka tengah saya lihat kinerja yang sangat bagus dan merakyat langsung, tidak jarang juga beliau sering mengadakan event sederhana seperti jalan santai berhadiah, 17 agustus, Erzaldi Cup dalam tournament sepak bola antara RT, itulah yang menjadi daya tarik Pak Erzaldi terhadap rakyatnya.”

Lanjutnya dalam wawancara tersebut, Rheza mengatakan bahwa sosok Pak Erzaldi sudah familiar dikalangan masyarakat dan beliau pun dikenal ramah kepada masyarakat serta tidak enggan untuk membantu masyarakat yang membutuhkannya. Pak Erzaldi sosok pemimpin yang luar biasa, beliau banyak membantu masyarakat yang kurang mampu. Berdasarkan persepsi tersebut responden menilai Pak Erzaldi sangat baik dalam kinerja serta dalam mengatasi masalah.

1.4 Politik Uang

Berkaitan dengan Pilkada sikap pragmatis merupakan suatu gejala yang sebetulnya positif kalau pragmatisme itu diartikan mencari peluang yang paling besar untuk memenangkan calon. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tingkah laku politik merupakan pencerminan dari budaya politik suatu masyarakat yang penuh dengan aneka bentuk karakter dan aneka bentuk kelompok dengan berbagai tingkah lakunya.

Seorang pragmatis tidak akan peduli kubu politik mana yang menang dan hanya peduli pada seberapa baik kebijakan telah berjalan. Pragmatisme politik adalah ciri khas kultur politik dalam masyarakat yang berprinsip "*yang penting sesuatu/program berfungsi, tak peduli caranya*". Singkat kata, pragmatisme adalah penolakan terhadap teori dan ideologi dan lebih memilih fakta dan realitas yang telah teruji, namun, sisi negatif pragmatisme ketika pemilih pemula berhadapan persoalan ekonomi.

Menurut Dion Saputra Prayoga Hermawan, ketika ditanya apakah politik uang dengan bentuk apapun ditemukan saat pemilu kala itu, Dion menjawab bahwa hal itu adalah hal yang umum dan bukan menjadi rahasia lagi hingga dikalangan pemilih pemula. Hal yang menarik dalam konteks politik uang kali ini meskipun sudah biasa pula ditemukan ditempat lain Dion sebagai pemilih pemula tetap menjaga rasionalitas mereka dalam memilih dengan melihat terlebih dahulu kandidat yang diajukan, visi-misi hingga kinerja meskipun akan menerima juga pemberian politik uang dalam bentuk apapun.

Senada dengan hal tersebut, Wahaidatul Lailia beranggapan bahwa itu adalah rezeki dan “*yang namanya rezeki tidak boleh ditolak*”. Meskipun demikian, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya bahwa walaupun mereka menerima pemberian politik uang berbentuk bantuan, mereka tetap akan memilih dengan melihat terlebih dahulu kandidat yang diajukan, visi-misi hingga kinerja sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan pilihannya.

1.5 Pendidikan dan Kesadaran Politik Bagi Taruna

Pendidikan politik yang bisa diberikan kepada pemilih pemula bisa berupa pemahaman tentang pemilu dan siapa yang dia inginkan untuk menjadi wakil atau pemimpin. Lebih lanjut Darwis mengatakan bahwa, jika pendidikan politik yang diberikan keliru, maka akan berdampak secara terus menerus dari pemilu ke pemilu, yang nantinya akan berimbas pada kualitas sistem politik yang tidak bagus yang dikarenakan pendidikan politik yang tidak bagus pula.

Dengan kata lain pendidikan politik menginginkan agar Taruna/i berkembang menjadi warganegara yang baik, yang menghayati nilai-nilai dasar yang luhur dari bangsanya dan sadar akan hak-hak dan kewajibannya di dalam kerangka nilai-nilai tersebut. Nilai kebudayaan remaja antara lain adalah santai, bebas dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan, oleh karena itu semua hal yang kurang menyenangkan dihindari.

Kesimpulan

Rasionalitas merupakan tindakan perseorangan untuk mengarah kepada tujuan yang ditentukan oleh pilihan (preferensi). Orang yang rasional tak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan pilihan orang tersebut. Berdasarkan uraian-uraian terkait issue politik, kandidat yang diajukan serta kandidat yang memberikan keuntungan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan tentang bagaimana rasionalitas Taruna pemilih pemula dalam Pilkada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 di SMK Negeri 4 Kemaritiman Kota Pangkalpinang.

Issue politik menjadi preferensi pertama bagi Taruna/i untuk menentukan pilihannya dengan menyajikan Issue Agama dan Issue nasionalisme / kebangsaan. Seorang Taruni menyatakan bahwasanya dia akan memilih pemimpin yang seagama dengannya, tetapi ketika issue tersebut dialihkan dengan melihat figur maka responden tersebut akan memilih figur dengan memperhatikan kinerja meski berbeda agama. Menampilkan kandidat yang diajukan merupakan instrumen kedua yang dipilih peneliti untuk melihat rasionalitas Taruna/i.

Semua Taruna/i yang menjadi responden dalam penelitian ini menyatakan memilih pemimpin berdasarkan kandidat yang diajukan dengan melihat komunikasi politik, manajemen birokrasi serta kinerja dari kandidat. Dengan melihat ketiga hal tersebut, maka rasionalitas Taruna/I tampak jelas bahwa tindakan mereka mengarah kepada tujuan untuk memilih Erzaldi Rosman Djohan dalam pemilihan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017.

Erzaldi dinilai sebagai pemimpin yang pro generasi muda untuk dapat menyerap dan mengetahui keinginan dan harapan dari generasi muda. Dalam hal birokrasi, Erzaldi melakukan reformasi birokrasi dengan menjadikan organisasi pemerintah yang mampu menciptakan komunikasi integratif dengan masyarakat sebagai entitas yang wajib dilayani. Pada keadaan yang sudah sedemikian rupa, Taruna/i secara personal memberikan penilaian kinerja yang baik kepada Erzaldi.

Penilaian kinerja yang dimaksud adalah yang mampu menciptakan gambaran yang tepat mengenai orang yang dinilai dengan menilai dan memperbaiki kinerja yang buruk dan mendorong untuk bekerja lebih baik lagi. Instrumen terakhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah memilih kandidat yang menguntungkan, para Taruna/i dihadapkan pada *money politic* dalam menentukan pilihannya dengan memilih kandidat yang melakukan *money politic*. Taruna/i mengatakan bahwa mereka akan tetap menerima pemberian *money politic* dalam bentuk apapun tetapi hal tersebut tidak akan mempengaruhi mereka dalam menentukan pilihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amry, (2017). Perilaku politik kiai dalam pemilihan kepala daerah 2015.
- Astanti, Mudzakkir. (2016). Rasionalitas Politik Pemilih Pemula di Tegalsari Surabaya. 4. 1.
- Budiasa. (2016). Tindakan komunikatif komunitas veda phosana ashram badung dalam ritual agnihotra. 94.
- Chaniago. (2016). Mempertahankan Pilkada Langsung. 2. 1.
- Effendi, 2015. Selayang Pandang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Hamad. (2004). Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa. 8. 1.22.
- <http://babel.bps.go.id> kepualaun Bangka Belitung dalam angka 2015. Diakses pada 1 November 2017.
- http://www.geocities.com/mas_tri/sistemDP3.pdf. Diakses pada 19 Desember 2017.
- Imawan. (2000). Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik: Kepemimpinan Nasional Dan Peran Militer dalam Proses Demokratisasi. 4.
- Karimah. (2013). Perjuangan Hidup Single Parent. 3. 1, 91-92.
- Lindawati. (2013). Strategi Partai Politik Dalam Menghadapi Pemilu 2014. 4. 2.
- Mahadi, (2011). Pragmatisme Politik. *Jurnal studi pemerintahan*. V. 2. 1 103-104.
- Mahkamah Konstitusi. (2006). Jurnal Konstitusi. V 3. 4.
- Moleong. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. 4. 12 b. Bandung.

- Nasution. (2012). Pembentukan Budaya Perwira Tni-Ad Bagi Taruna Akademi Militer Di Lembah Tidar . 24.
- Prasetya. (2011). Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik. V. 1. 1, 32-36.
- Saliman. Proposal Penelitian Kualitatif. (FPIPSIKIP Yogyakarta).
- Susanto, (2010). Kelembagaan Reformasi Birokrasi Dan Pola Komunikasi Lembaga Pemerintah. V.1. 1. 109-118.
- Susanto, 2016. Bangka Belitung 2017-2022: Komunikasi Politik Dan Jajak Pendapat Dalam Pemilihan Kepala Daerah.
- Suryani, Azmy. (2016). Politik Identitas Dan Nasionalisme Kebangsaan. 33-36.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Veplun. (2014). Partisipasi Politik Pemilih Pemuladi Indonesia. 1103-1104.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.